

Filosofi Pengawasan: Peran Lembaga Pengawas dan Pemeriksa di Daerah



Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Agenda Paparan

1. Konsep dan Tujuan Pengawasan: Mencegah Penyimpangan dan Korupsi.
2. Fakta tentang Kurang Efektifnya Pengawasan.
3. Pengawasan & Pemeriksaan: Duplikasi Fungsi.
4. Agenda kebijakan dan strategi pengawasan di daerah.

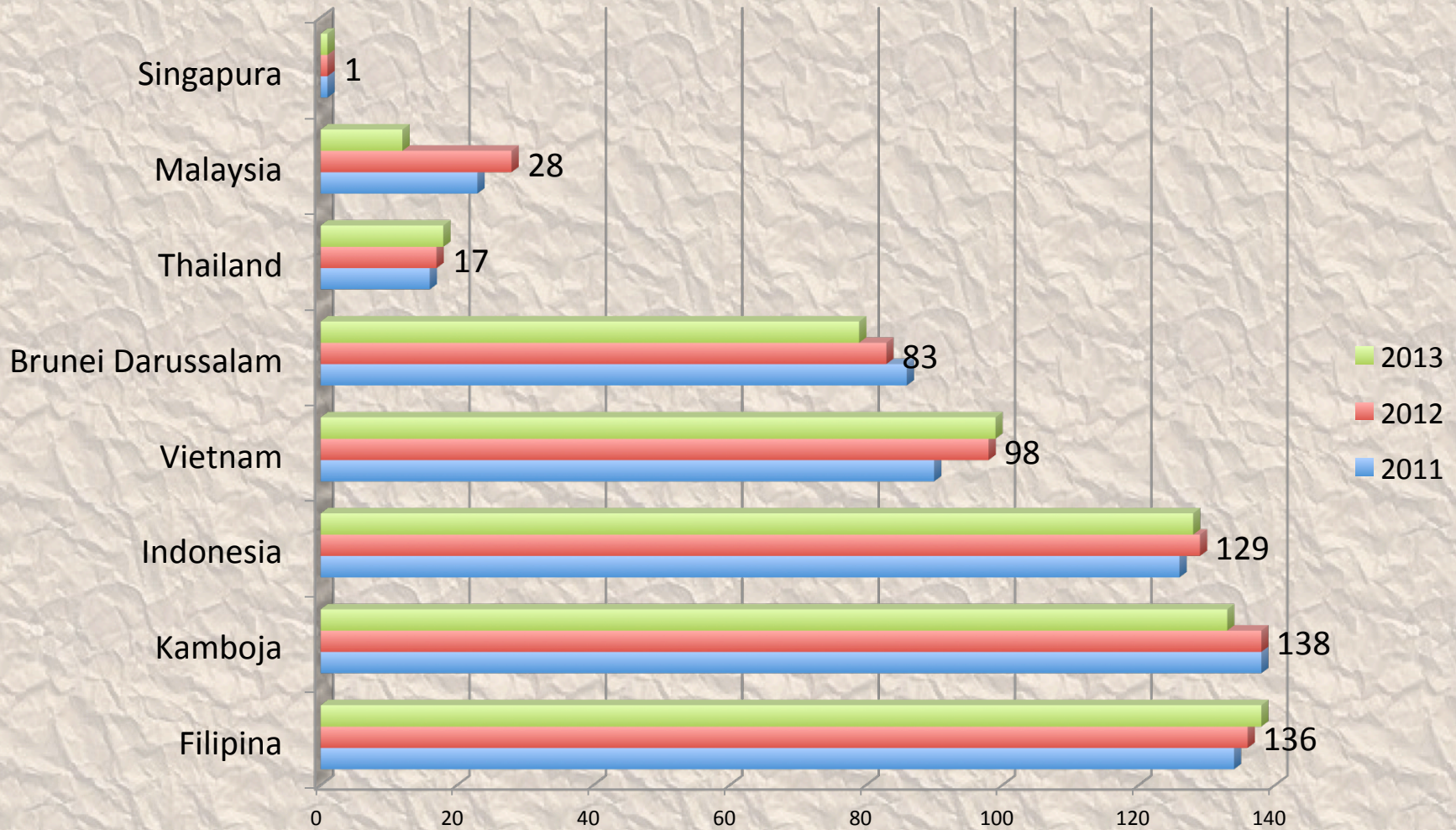
Konsep Pengawasan

- Pengawasan (*controlling*): “a process of monitoring performance and taking action to ensure desired results” (Schmeisser et al, 2010).
- Three basic activities:
 1. Establishing a bench-mark/standard,
 2. Comparing performance against them,
 3. Suggesting corrective actions.
- Tujuan audit internal: 1) efisiensi/efektivitas pelayanan publik, 2) keandalan (*reliability*) laporan keuangan & manajemen, 3) kesesuaian dg peraturan.

Sasaran Pengawasan (Simmons, 1995)

1. Informasi keuangan dan operasional akurat dan andal (*reliable*).
2. Kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan ditaati.
3. Aset terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik.
4. Sumberdaya digunakan secara ekonomis dan efisien.
5. Tujuan program dan manfaat pelayanan publik dapat dioptimalkan.

Korupsi Membuat Daya Saing Indonesia Tetap Lemah



Target Reformasi Birokrasi 2019-2014

Banyak Meleset

Target	Indikator	Baseline (2009)	Target (2014)	
Menciptakan pemerintahan yg bersih (bebas dari korupsi)	Indeks Persepsi Korupsi	2,8	5,0	
	Opini WTP menurut BPK	Pusat	42,17%	100%
		Daerah	2,73%	60%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Integritas Nasional	Nasional	6,64	8,0
		Daerah	6,46	8,0
	Peringkat kemudahan menjalankan bisnis	122	75	
Pengembangan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Efektivitas Pemerintahan	-0,29	0,5	
	Penyampaian LAKIP	24%	80%	

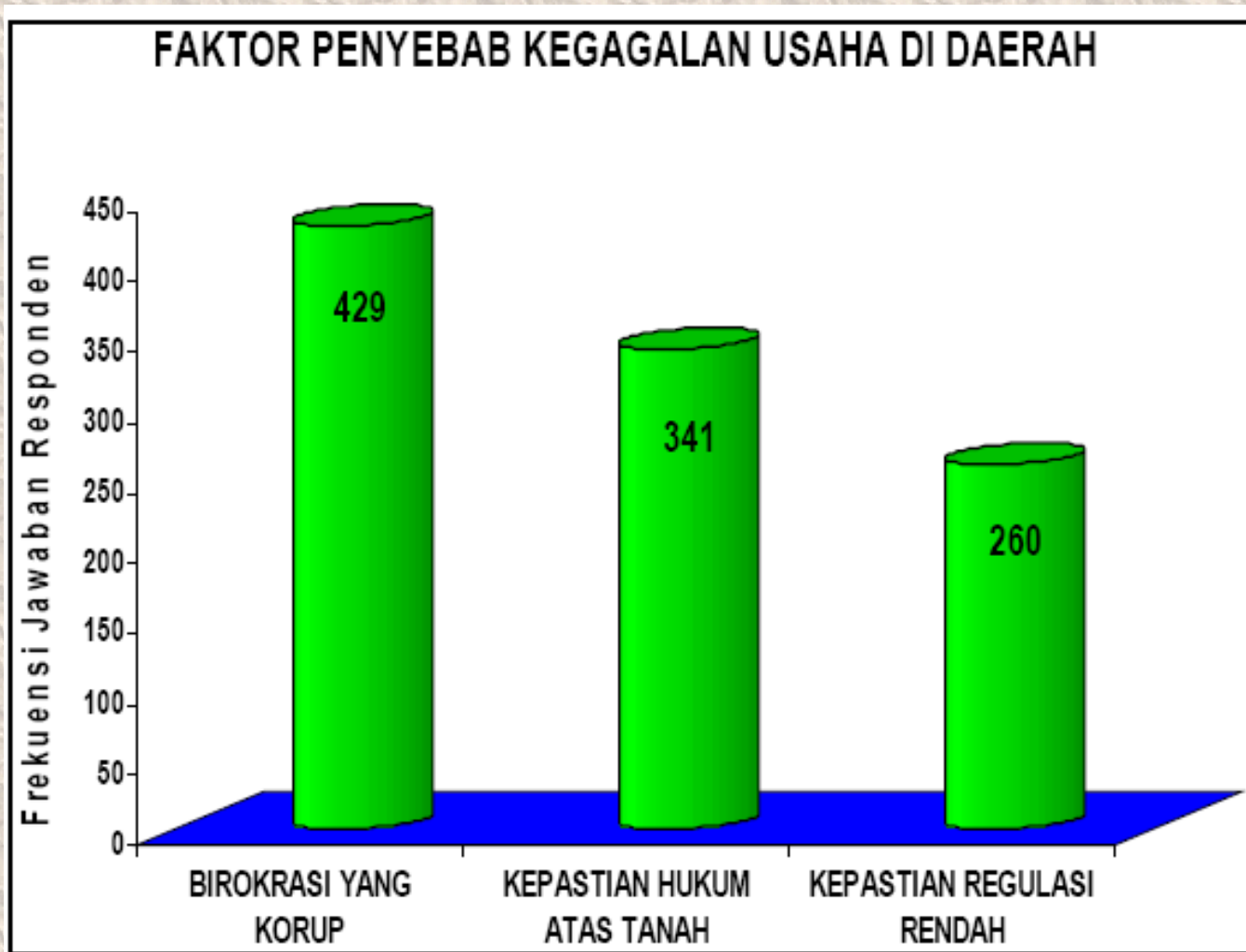
Perkembangan Indikator Tata-Kelola

No	Indikator	Status Awal (2009)	Realisasi		
			2010	2011	2012
1	Indeks Persepsi Korupsi	2,8	2,8	3,0	32
2	% K/L dengan opini WTP di Pusat	41	56	63	77
3	% Pemda dengan opini WTP	2,7	3	9	16
4	Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	6,6	6,2	7,1	6,9
5	Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,5	5,3	6,0	6,3
6	Peringkat <i>Ease of Doing Business</i> /Kemudahan berbisnis	129	115	126	129
7	Indeks Efektivitas Pemerintahan	-0,3	-0,2	-0,2	n.a
8	% K/L yang akuntabel	47,4	63,3	82,9	95,1
9	% provinsi yang akuntabel	3,8	31	63,3	75,8
10	% kabupaten/kota yang akuntabel	5,1	8,8	12,8	24,4
11	Jumlah unit pengadaan secara elektronik (LPSE)	n.a	137	353	549
12	Jumlah paket pengadaan melalui LPSE	n.a	6.397	24.475	91.008
13	Nilai Pagu pengadaan (Miliar)	n.a	12.971	38.163	133.871

Most Problematic Factors in Indonesia

No	2010	2011	2012	2013
1	Inefisiensi Birokrasi	Korupsi	Inefisiensi Birokrasi	Korupsi
2	Korupsi	Inefisiensi Birokrasi	Korupsi	Inefisiensi Birokrasi
3	Infrastruktur	Infrastruktur	Infrastruktur	Infrastruktur
4	Akses Pembiayaan	Ketidakstabilan Politik	Etika kerja buruk	Akses pembiayaan
5	Inflasi	Akses Pembiayaan	Peraturan ketenagakerjaan	Peraturan ketenagakerjaan

Sumber: RKP 2014



Sumber: Governance Assessment Survey, 2006

Pertumbuhan Kemakmuran Jepang vs. Filipina

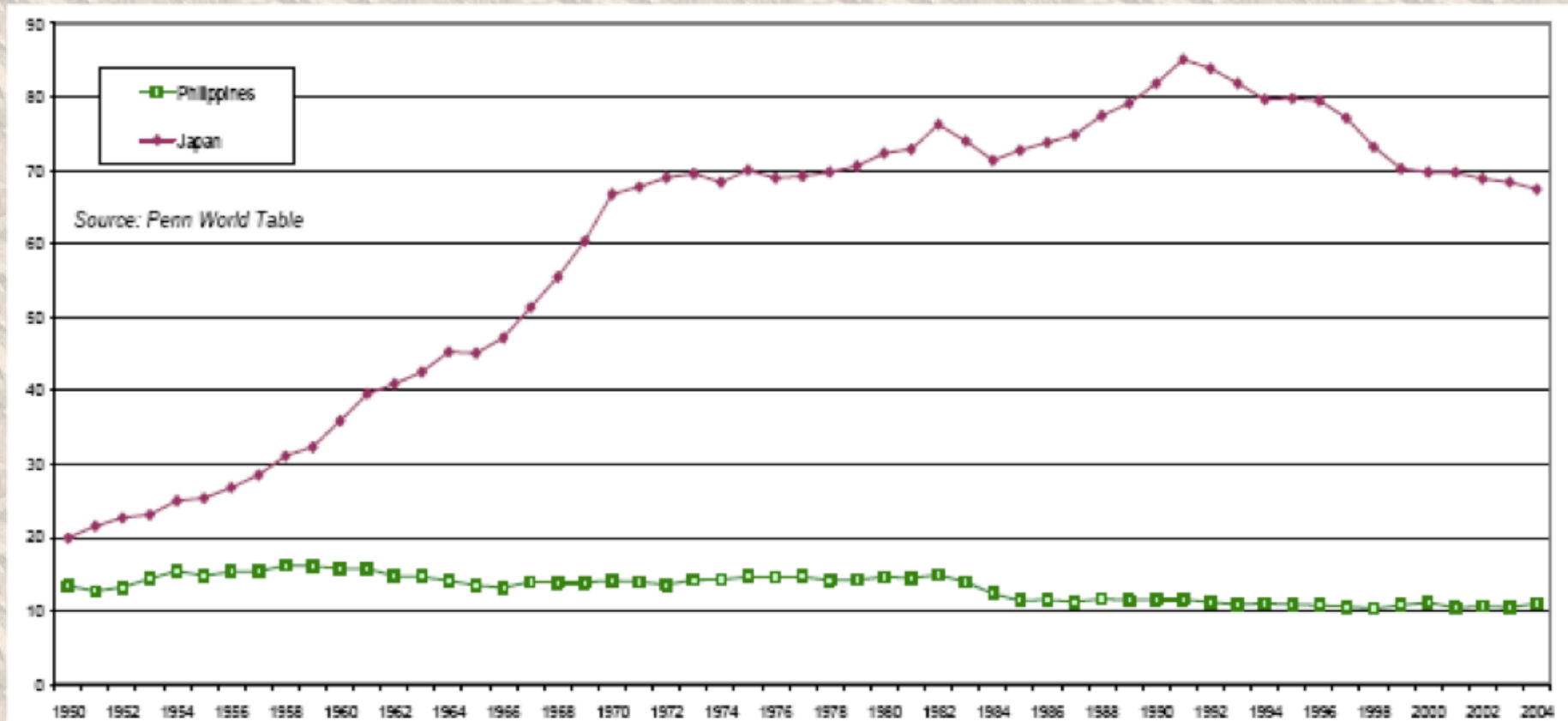


Figure 2B -- Japan & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

Filipina vs. Cina

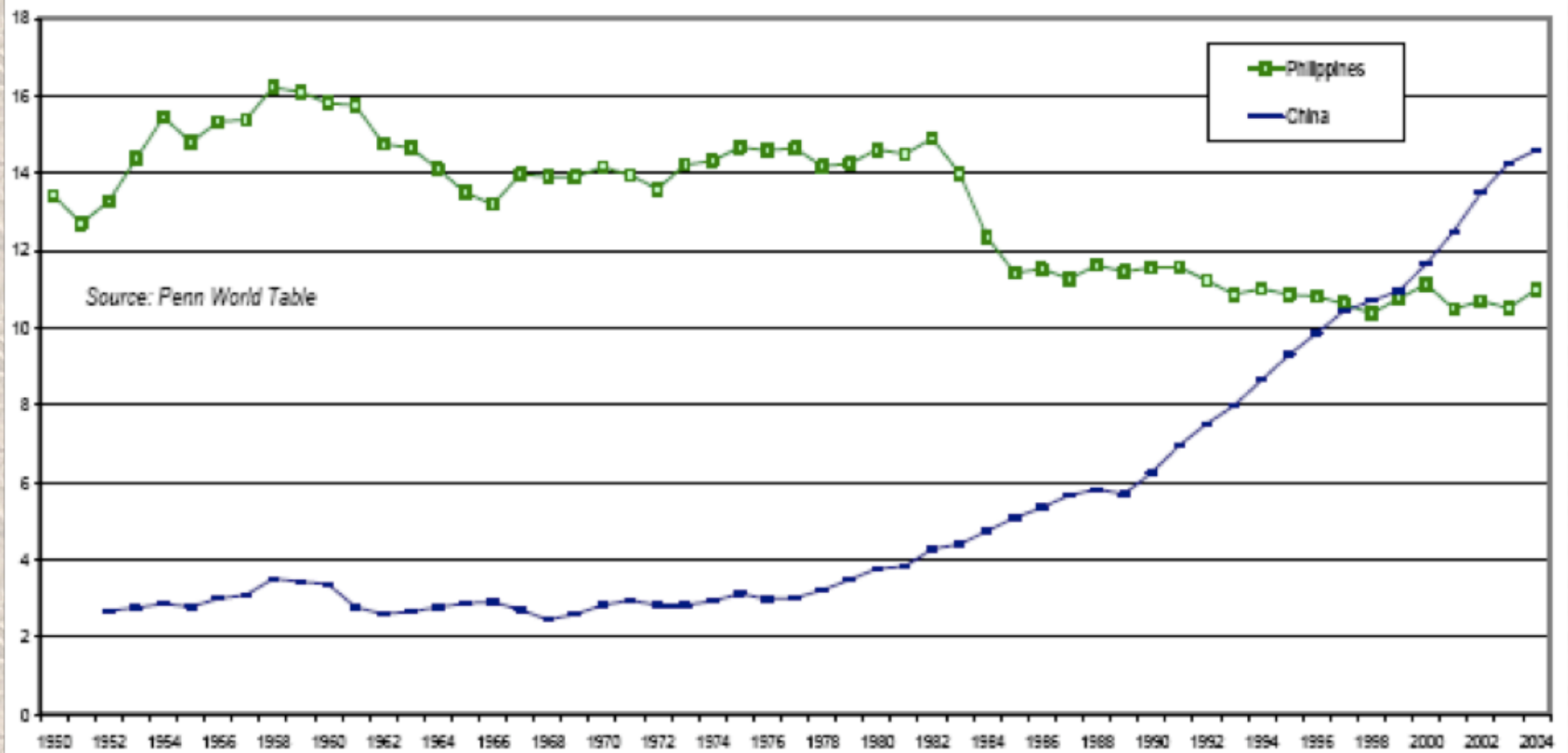


Figure 8B -- China & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA BANGSA TERSEBUT



www.reason.com

Bangsa India dan Mesir, umurnya lebih dari 2.000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang dalam pola hidup yang tidak pernah berubah (dan tetap miskin).



eharfoush.blogspot.com®

مساهمات التنمية البشرية والسلوكيات الحضارية

KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA BANGSA TERSEBUT



www.aviationadvertiser.co.au

Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, adalah negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun. Tetapi saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.



www.infocomsingapore.sg



www.bcbudget.gov.bc.ca

Apa Prinsip Masyarakat di Negara Maju?

1. Etika, sebagai prinsip dasar dlm kehidupan sehari-hari.
2. Kejujuran dan integritas
3. Bertanggung jawab
4. Hormat pada aturan & hukum masyarakat
5. Hormat pada hak orang/warga lain
6. Cinta pada pekerjaan
7. Berusaha keras untuk menabung & investasi
8. Mau bekerja keras
9. Tepat waktu.

Indeks Persepsi Korupsi di 32 Kota

No	Kabupaten/ Kota	IPK 2006	IPK 2004
1	Kota Palangkaraya	6.61	-
2	Kota Pare-pare	5.66	-
3	Kabupaten Tanah Datar	5.66	4.87
4	Kabupaten Wonosobo	5.66	5.63
5	Kota Yogyakarta	5.59	4.51
6	Kabupaten Solok	5.51	4.70
7	Kota Kupang	5.51	-
8	Kota Padang	5.39	4.83
9	Kota Semarang	5.28	4.17
10	Kota Ambon	5.28	-
11	Kota Makassar	5.25	5.31
12	Kota Balikpapan	5.10	4.59
13	Kabupaten Kotabaru	4.94	5.23
14	Kota Banjarmasin	4.93	5.39
15	Kota Manado	4.87	5.12
16	Kota Banda Aceh	4.69	-

No	Kabupaten/ Kota	IPK 2006	IPK 2004
17	Kota Medan	4.67	4.09
18	Kota Palembang	4.60	4.67
19	Kota Batam	4.51	4.32
20	Kota Tangerang	4.51	4.54
21	Kota Pekanbaru	4.43	4.37
22	Kota Surabaya	4.40	3.93
23	Kota Bekasi	4.27	4.61
24	Kota Larantuka	4.21	-
25	Kota Tual	4.02	-
26	DKI Jakarta	4.00	3.87
27	Kota Pontianak	3.95	-
28	Kota Cilegon	3.85	5.28
29	Kota Denpasar	3.67	4.44
30	Kota Gorontalo	3.44	-
31	Kota Mataram	3.42	-
32	Kota Maumere	3.22	-

Status Pelaporan LHKPN 2010

No.	Provinsi	Jml Wajib Lapor	Jml Sdh Lapor	% Sdh Lapor
1	NAD	1,607	1,112	69.20%
2	Sumut	2,947	1,565	53.10%
3	Sumbar	1,889	1,202	63.63%
4	Riau	1,662	1,216	73.16%
5	Kepri	1,282	893	69.66%
6	Kep Babel	441	340	77.10%
7	Bengkulu	874	610	69.79%
8	Jambi	1,812	936	51.66%
9	Sumsel	3,619	2,528	69.85%
10	Lampung	2,160	1,632	75.56%
11	DKI	1,495	1,008	67.42%
12	Jabar	4,459	3,598	80.69%
13	Banten	970	728	75.05%
14	Jateng	5,148	3,764	73.12%
15	DIY	2,058	1,645	79.93%
16	Jatim	5,863	3,876	66.11%

Mumpung Panas (*Hot Stove Rule*)

Supaya Efektif, Audit Kinerja harus:

- Segera (*Immediate*)
- Fokus pada kegiatan, bukan pribadi
- Konsisten
- Informatif
- Dilakukan dalam suasana suportif
- Mendukung ketentuan yg realistis.

Study KPK

•Melakukan studi dan model berbagai praktek good governance:

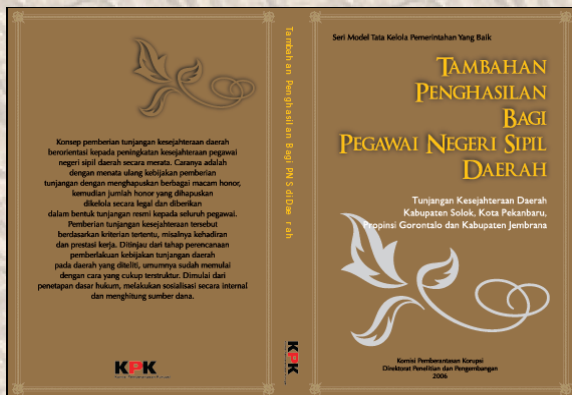
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pengalaman Empirik di Sembilan Daerah



Memahami untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Empat Daerah Contoh



Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok Dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



HASIL DAERAH PELAKSANA GOOD GOVERNANCE (GG)

Contoh #1: Kabupaten Sragen

- Jenis Good Governance yang dilakukan: Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Terpadu (One Stop Service) 52 perijinan dan 10 non perijinan
- Komitmen pimpinan sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan GG di daerah ini
- Hasil yang diperoleh:
 - 1. Peningkatan Investasi Industri Besar : dari 110 Milyar menjadi 555.7 Miliar di 2006**
 - 2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja: dari 28 976 menjadi 41 800 orang di 2006**
 - 3. PDRB Per Kapita naik 57% (dari tahun 2000 ke tahun 2004)**
 - 4. PAD selalu meningkat dari tahun ke tahun**
 - 5. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4.53% di tahun 2004 menjadi 5.06% di 2005**
 - 6. Peningkatan potensi fiskal, dari 8 terbawah menjadi di atas rata-rata nasional**

HASIL DAERAH PELAKSANA GOOD GOVERNANCE (GG)

Contoh #2: Kabupaten Solok

- Jenis Good Governance yang dilakukan sangat banyak dan komprehensif: Pelayanan Satu Pintu, Giro to Giro, Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran Berbasis Kinerja, Partisipasi Masyarakat, Pola Partisipatif, Revolving Fund
- Komitmen pimpinan dan sistem yang baku sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan GG di daerah ini
- Hasil yang diperoleh:

1. Berkurangnya secara signifikan korupsi, kolusi dan nepotisme

2. Berubahnya paradigma aparat menjadi “pelayan masyarakat”

3. Kegiatan GG yang saling terkait antara satu dan yang lain menutup celah KKN

4. Integritas PNS menjadi lebih baik

Isu-Isu Strategis

Pencegahan Korupsi: Internasional

- Internasional
 - UU.No: 7/2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi.
 - Kerjasama Internasional, Asset Recovery, Korupsi di Sektor Swasta, Technical Assistance.
 - Nopember 2007 – Seminar IACA di Bali-Indonesia
 - January 2008 – Second State Party Conference
 - APEC
 - Anti Corruption High Level Statement
 - Peningkatan kerjasama
 - Ekstradisi, Mutual Legal Assistance, Asset Recovery.
 - Pedoman Perilaku Aparat Pemerintah dan Swasta.

Isu-Isu Strategis Pencegahan Korupsi: Nasional

- Domestik
 - Tuntutan Masyarakat tetap kuat
 - Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - Harmonisasi UU TPK dengan diratifikasinya Konvensi PBB Menentang Korupsi.

Bentuk – Bentuk Penyimpangan Birokrasi

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Pembayaran fiktif
3. Kolusi/persekongkolan
4. Biaya perjalanan dinas fiktif
5. Suap/uang pelicin
6. Pengutan tidak resmi
7. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor
8. Imbalan tidak resmi
9. Pemberian fasilitas secara tidak adil
10. Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur
11. Tidak disiplin waktu
12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara
13. Menunda / memperlambat pembayaran
14. Pengumpulan dana taktis
15. Penyalahgunaan anggaran
16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan
17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual
18. Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi
19. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume
20. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.

FAKTA TENTANG KORUPSI & PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI INDONESIA

- Korupsi adalah pangkal dari semua masalah (*the root of all evil*)
- Trust rendah = penyalahgunaan kewenangan meningkat
- Korupsi bukan “budaya Indonesia”; terjadi karena kebiasaan dan karena orang tidak jujur, termasuk pada diri-sendiri.
- Korupsi bukan karena gaji kurang
- Pertimbangan moral vs. Pertimbangan hukum.

Perlu Perubahan Paradigma

Formal:

Berdasar dokumen /
faktur
Kaku / statis
Prosedural
Berpedoman pd aturan

Material:

Berdasar logika /
pengamatan langsung
Dinamis
Praktikal
Berpedoman pd tujuan
pelayanan

Tantangan Kinerja Auditor

- Fokus pada tujuan, bukan sekadar prosedur formal
- Tindakan koreksi, bukan banyaknya “temuan”
- Menguasai indikator kinerja SKPD, bukan sekadar laporan keuangan
- Memahami “medan” politik, tetapi tetap bekerja objektif.

Duplikasi Fungsi?

Fungsi	Lembaga
Pengawasan	DPR / DPRD
Pemeriksaan	BPK
	BPKP
	Inspektorat Daerah
Akuntabilitas Kinerja	Kantor Menpan

Hambatan Utama Pencegahan Korupsi & Penyimpangan

Aspek Struktural

1. Lemahnya koordinasi
2. Ego Sektoral / Instansional
3. Lemahnya pelaksanaan SPI
4. Belum efektifnya pelaksanaan LHP

Aspek Kultural

Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan profesionalisme SDM

Aspek Instrumental

Masih adanya peraturan perundangan dan kebijakan yang belum mendukung pemberantasan KKN

Aspek Manajemen

1. Kualitas kepemimpinan yang kurang komitmen, konsisten dan tegas
2. Kurang dukungan teknologi informasi.

Terima kasih